



**BPR PURWAKARTA**  
PERUMDA BPR KABUPATEN PURWAKARTA

**2023**

# **LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2023**

**JL. VETERAN NO. 124  
PURWAKARTA  
PURWAKARTA, KAB. 41115**



## DAFTAR ISI

Daftar isi .....	1
Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PERUMDA BPR PURWAKARTA	
Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PERUMDA BPR PURWAKARTA Tahun 2023	2
<b>A Transparansi Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PERUMDA BPR PURWAKARTA</b>	<b>2</b>
1 Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> berdasarkan hasil <i>Self Assessment</i> .....	2
a Pelaksanaan tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas dan Direksi .....	3
b Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern ...	5
c Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern .....	7
d Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait ( <i>related party</i> ) dan Penyediaan Dana Besar ( <i>large exposure</i> ) .....	7
e Rencana Strategi Bank .....	8
f Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank .....	11
2 Kepemilikan Saham Dewan Pengawas dan Direksi .....	12
3 Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas dan Direksi .....	12
4 Paket/Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain Dewan Pengawas dan Direksi .....	13
5 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah .....	14
6 Frekuensi Rapat Dewan Pengawas .....	14
7 Jumlah Penyimpangan Internal ( <i>Internal Fraud</i> ) .....	15
8 Permasalahan Hukum .....	15
9 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan .....	15
10 Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik.....	15
<b>B Kesimpulan Umum Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> .....</b>	<b>15</b>

## PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

### PERUMDA BPR PURWAKARTA TAHUN 2023

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

#### **Tujuan Pelaksanaan GCG di PERUMDA BPR PURWAKARTA**

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- d. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

#### **A. Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance***

1. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan hasil *Self Assessment* meliputi 7 (tujuh) aspek berikut :

##### **a. Pelaksaaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas dan Direksi.**

- a.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Pengawas belum sesuai ketentuan dan Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Dewan Pengawas berjumlah 1 (satu) orang .

2. Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas, dengan komposisi sebagai berikut :
    - Ketua : R. Muchamad Nurcahya, ST.MM.
    - Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
      - Direktur Utama : Dedeh Kurniasih  
(Merangkap Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan)
      - Direktur Pemasaran : Asep Kustiwa
  3. Setiap anggota Dewan Pengawas dan Direksi telah sepenuhnya lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
  4. Sesama anggota Dewan Pengawas dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- a.2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas dan Direksi
- 1) Tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas
    - Dewan Pengawas telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
    - Dewan Pengawas telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
    - Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
    - Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.
    - Dewan Pengawas telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.
    - Dewan Pengawas berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya.
    - Dewan Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait yang sumber pembayarannya bukan dari pemotongan penghasilan yang diperoleh dari BPR dengan tujuan untuk kesejahteraan

pegawai dan pengurus, memberikan persetujuan pada ranahnya Dewan Pengawas terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

## 2). Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Sepanjang Keputusan Bupati tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan auditor eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan , Kantor Akuntan Publik dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham.

### a.3. Rekomendasi Dewan Pengawas

Rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- Persetujuan RBB tahun 2024 yang dikirim pada tanggal 15 Desember 2023 dalam rangka pemenuhan POJK No. 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat
- Penunjukkan Auditor External untuk pemeriksaan Laporan keuangan tahun 2023
- Persetujuan Laporan Tata Kelola tahun 2022
- Persetujuan Laporan Kepatuhan 2022
- Persetujuan Laporan Manajemen Resiko Tahun 2022
- Persetujuan penyesuaian penghasilan pegawai sesuai Upah Minimum Kabupaten Purwakarta tahun 2023

- Rekomendasi atas usulan Direksi terkait penyesuaian penghasilan pengurus tahun 2023.

## **b. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.**

### **b.1. fungsi kepatuhan**

- Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Direktur telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur yang secara berkala melaporkan ke Dewan Pengawas.
- Direktur telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Hingga akhir Desember 2023 masih terdapat kekosongan jabatan PE Kepatuhan dan Manajemen Resiko.

### **b.2. fungsi audit intern**

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif sesuai SPFAIB.
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada BPP Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (*Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan*), Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, Audit Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan dewan Pengawas.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan Tembusan ke Dewan Pengawas.
- Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

### **b.3. Fungsi Audit Ekstern**

- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- Penunjukkan KAP sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengawas dan ditunjuk/ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui Surat Keputusan Bupati.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

**c. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.**

c.1. Pengawasan aktif Dewan Pengawas dan Direksi.

- Dewan Pengawas mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Dewan Pengawas dapat dibantu oleh Audit Internal.
- Dewan Pengawas telah melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi mengingat Kebijakan Manajemen Risiko sudah disusun oleh Direksi, dan Dewan Pengawas telah memberikan persetujuan dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

c.2. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

- Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (*credit line*) yang memerlukan persetujuan Direksi.
- Direksi telah melakukan penyusunan kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis, tetapi belum menetapkan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.

**d. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Related Party*) atau BPMK**

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BPMK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BPMK PERUMDA BPR PURWAKARTA

3. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
4. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2023 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	3	168,22
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	25	4.146,054
	b. Group	-	-

#### e. Rencana Strategis Bank

##### e.1. Rencana jangka pendek tahun 2023

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2023

- . Adanya kondisi internal BPR yaitu kekosongan jabatan Dewan Pengawas sejak bulan April sampai dengan Oktober 2023 menyebabkan beberapa program kerja yang ada dalam RBB 2023 belum dapat direalisasikan serta faktor eksternal BPR yang tidak bisa dihindari yaitu kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil serta perubahan beberapa kebijakan dari otoritas terkait sangat berdampak terhadap kinerja BPR Purwakarta.

Dampak yang dirasakan oleh BPR yaitu :

1. Perlambatan pertumbuhan kredit sehubungan penurunan permintaan kredit dan prioritas dana likuiditas untuk pengembalian penarikan simpanan deposito dari bank lain
2. Peningkatan rasio kredit bermasalah khususnya sector yang sangat terdampak oleh Covid-19 yaitu sector UMKM dan menurunnya jumlah penyaluran kredit baru
3. Tingginya likuiditas bank sehubungan dana yang tidak tersalurkan melalui kredit pada posisi triwulan ke 4 tahun 2023
4. Kredit yang telah dilakukan *Restruktur Covid-19* mulai 2020 hingga 2023 tidak mengalami perbaikan , atas kondisi tersebut secara bertahap bank melakukan adjustment kolektibilitas kredit yang direstruktur tersebut kembali ke kolektibilitas kredit sesuai POJK nomor 33 tahun 2018 . Dengan pelaksanaan kebijakan tersebut

maka kredit bermasalah mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan adanya koreksi pendapatan bunga kredit yang telah diakui serta kekurangan pencadangan PPAP kredit .

- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.
- Terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.

Memperhatikan hal tersebut, untuk mempertahankan eksistensi bank dalam kondisi pemulihan pandemic yang penuh dengan ketidakpastian yang akan dijadikan strategi PERUMDA BPR PURWAKARTA jangka pendek difokuskan pada pengembangan asset bank dan kesehatan bank dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung bertahannya bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Menyelamatkan sektor kredit yang sangat terdampak oleh *Covid-19* melalui restrukturisasi kredit UMKM maupun konsumtif sesuai dengan ketentuan .
- Menjaga likuiditas bank sehubungan dengan penurunan kegiatan perekonomian dimana masyarakat cenderung melakukan penarikan simpanan dana di bank untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengurangi permintaan jumlah pengajuan kredit khususnya kredit modal kerja.
- Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen yang tidak terdampak *Covid-19* yaitu sektor konsumtif dan untuk kredit modal kerja dilakukan pembatasan dengan lebih selektif hanya untuk sector usaha yang tidak terdampak *covid-19* . Berdasarkan RBB tahun 2023 aset ditargetkan naik 12,14% dan realisasi kenaikan pada tahun 2023 sebesar 5,72 % dari tahun 2022 dan realisasi rasio LDR tahun 2023 sebesar 74,51 %, peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban PERUMDA BPR PURWAKARTA.
- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan , bunga yang kompetitif dengan target pertumbuhan tabungan sebesar Rp 1.665.785 juta (atau 13,28 %) dan deposito sebesar Rp 951,852 juta (atau 16,78 %) dari tahun 2022..

- Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO)
- Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (*collection and recovery*).
- Implementasi GCG untuk kepentingan intern agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.
- Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.

#### e.2. rencana jangka menengah tahun 2023

##### 1) Finansial

- Mencapai rata-rata ROE di atas 5 %.
- Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR.
- Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif

##### 2) Customer

- Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
- Mencapai pangsa pasar di segmen UMKM di atas 15 %.
- Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PERUMDA BPR PURWAKARTA

##### 3) Pegawai

- Mencapai skor tertinggi dalam survey kepuasan pegawai.
- Peningkatan kesejahteraan pegawai sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
- Meningkatnya profesionalisme SDM PERUMDA BPR PURWAKARTA melalui *Competency Based Human Resources Management*.

#### **f. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.**

1. Bank telah menyusun SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
2. Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.
3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
4. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
5. PERUMDA BPR PURWAKARTA menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Pengawas, sesuai dengan SOP PERUMDA BPR PURWAKARTA

## 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

Dewan Pengawas dan Direksi PERUMDA BPR PURWAKARTA tidak memiliki saham pada PERUMDA BPR PURWAKARTA, Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

Nama	Jabatan BPR Purwakarta	Jabatan BPR lain	Jabatan Prshn Lain	PS BPR/ Prshn Lain	Bidang Usaha
R.Muchamad Nurcahya, ST.MM.	Ketua Dewan Pengawas	-	-	-	-
Dedeh Kurniasih	Direktur utama	-	-	-	-
Asep Kustiwa, SE	Direktur Pemasaran	-	-	-	-

## 3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

### a. Hubungan Keuangan

- Ketua Dewan Pengawas PERUMDA BPR PURWAKARTA secara tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Anggota Dewan Pengawas PERUMDA BPR PURWAKARTA, merupakan Pengawas independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Pengawas lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan pengendalinya adalah Dewan Pengawas lainnya dan/atau Direksi Bank.

- Seluruh anggota Direksi PERUMDA BPR PURWAKARTA tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

b. Hubungan Keluarga

Dewan Pengawas dan Direksi PERUMDA BPR PURWAKARTA tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dewas		Direksi		PSP		Dewas		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
R.Muchamad Nurcahya, ST.MM.	Ketua		√		√		√		√		√		√

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dewas		Direksi		PSP		Dewas		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Dedeh Kurniasih	Dirut/Dir Kepatuhan		√		√		√		√		√		√
Asep Kustiwa, SE	Direktur Pemasaran		√		√		√		√		√		√

**4. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Pengawas dan Direksi**

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Pengawas dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2022 sebesar Rp 1.224,91 juta selama tahun 2023 terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Pengawas		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, al tantiem dll	3	Rp 222,10 Juta	2	Rp 675,69 juta
Fasilitas lain dalam bentuk natura /				

non natura (fas. Tidak tetap lainnya al, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki				
--	--	--	--	--

Jumlah anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Pengawas
Di atas Rp 2 miliar		
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar		
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar		
Rp 500 juta ke bawah	2 orang	1 orang

## 5. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

- a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 162,59 %
- b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 125 %
- c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 125 %

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan	
		Tertinggi	Terendah
1	Pengawas	Rp. 9,160 juta	Rp. 7,327 Juta
2	Direksi	Rp.22,899 Juta	Rp. 18,319 Juta
3	Pegawai	Rp. 7,414 Juta	Rp. 4,560 Juta

## 6. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

- a. Rapat Dewan Pengawas telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Pengawas dan pengaturan Rapat Dewan Pengawas juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Pengawas dan Direksi.
- b. Pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas sebanyak 4 kali dalam setahun.

## 7. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PERUMDA BPR PURWAKARTA selama tahun 2023 adalah tidak ada/ tidak pernah terjadi.

## 8. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PERUMDA BPR PURWAKARTA, selama tahun 2023 tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

### 9. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

### 10. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PERUMDA BPR PURWAKARTA selama tahun 2023 adalah untuk kepentingan sosial kepada 88 (delapan puluh delapan) penerima dengan total sebesar Rp 240,160 juta sebagaimana tabel 4 pada lampiran laporan, dan tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PERUMDA BPR PURWAKARTA

## B. Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance*.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PERUMDA BPR PURWAKARTA periode Desember 2023, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposisi GCG sebesar 2.53 dengan prediksi Baik
- b. Peringkat masing-masing per faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	15.00%	3	0.45
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	2	0.4
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2	0.2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	3	0.3
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	3	0.3
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	2	0.05
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10.00%	3	0.3
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait ( <i>Related Party</i> ) dan Debitur Besar ( <i>Large Exposure</i> )	7.50%	1	0.075
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank,	7.50%	3	0.225

	Laporan GCG dan laporan Internal			
11	Rencana Strategis Bank	7.50%	3	0.225
	<b>Nilai Komposit</b>	<b>100.00%</b>		<b>2.53</b>
	<b>Prediksi Komposit</b>			<b>Baik</b>

c. Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Dengan disusunnya SOP GCG PERUMDA BPR PURWAKARTA, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Pengawas dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Dewan Pengawas telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Pengawas.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PERUMDA BPR PURWAKARTA tahun buku 31 Desember 2023. Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.

PURWAKARTA, 26 Januari 2024  
PERUMDA BPR PURWAKARTA



R. Muchamad Nurcahya, ST.MM.  
Ketua Dewan Pengawas



Dedeh Kurniasih  
Direktur Kepatuhan

1	Kelembagaan	100%	100%	100%
2	Struktur Organisasi	100%	100%	100%
3	Profil Perusahaan	100%	100%	100%
4	Struktur Organisasi	100%	100%	100%
5	Struktur Organisasi	100%	100%	100%
6	Struktur Organisasi	100%	100%	100%
7	Struktur Organisasi	100%	100%	100%
8	Struktur Organisasi	100%	100%	100%
9	Struktur Organisasi	100%	100%	100%
10	Struktur Organisasi	100%	100%	100%
11	Struktur Organisasi	100%	100%	100%
12	Struktur Organisasi	100%	100%	100%
13	Struktur Organisasi	100%	100%	100%
14	Struktur Organisasi	100%	100%	100%
15	Struktur Organisasi	100%	100%	100%
16	Struktur Organisasi	100%	100%	100%
17	Struktur Organisasi	100%	100%	100%
18	Struktur Organisasi	100%	100%	100%
19	Struktur Organisasi	100%	100%	100%
20	Struktur Organisasi	100%	100%	100%

